

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



***LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023***

DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

Alamat Jl. Ketumbar Kelurahan Komet Banjarbaru 70711

Telp. (0511)4781749 Email : dinsos@banjarbarukota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan sosial dan ekonomi, Dinas Sosial Kota Banjarbaru telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Sosial Kota Banjarbaru sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan organisasi.

Banjarbaru, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Banjarbaru



ROKHYAT RIYADI, SE.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199803 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi	2
	1.3 Struktur Organisasi	4
	1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis Organisasi	6
	1.5 Sistematika Penyajian	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
	2.1 Perjanjian Kinerja	11
	2.2 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	23
	3.1 Pengukuran Kinerja	23
	3.2 Pendukung Capaian Kinerja	24
	3.3 Capaian Kinerja Organisasi	27
BAB IV	PENUTUP	54
	4.1 Kesimpulan	54
	4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	63
	LAMPIRAN	
	SOP Pengumpulan data kinerja	
	SK Pengelola SAKIP	
	Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan kebijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Kedudukan Dinas Sosial Kota Banjarbaru adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Laporan kinerja disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama satu tahun berjalan sebagai bagian dari pertanggung jawaban dan upaya peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

Dasar Hukum Pembentukan

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Gambaran Umum Organisasi

1. Peraturan Daerah Pembentukan Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru .

2. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru, maka struktur Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
 - 2) Seksi Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza dan Rehabilitasi Tuna Sosial
 - 2) Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas

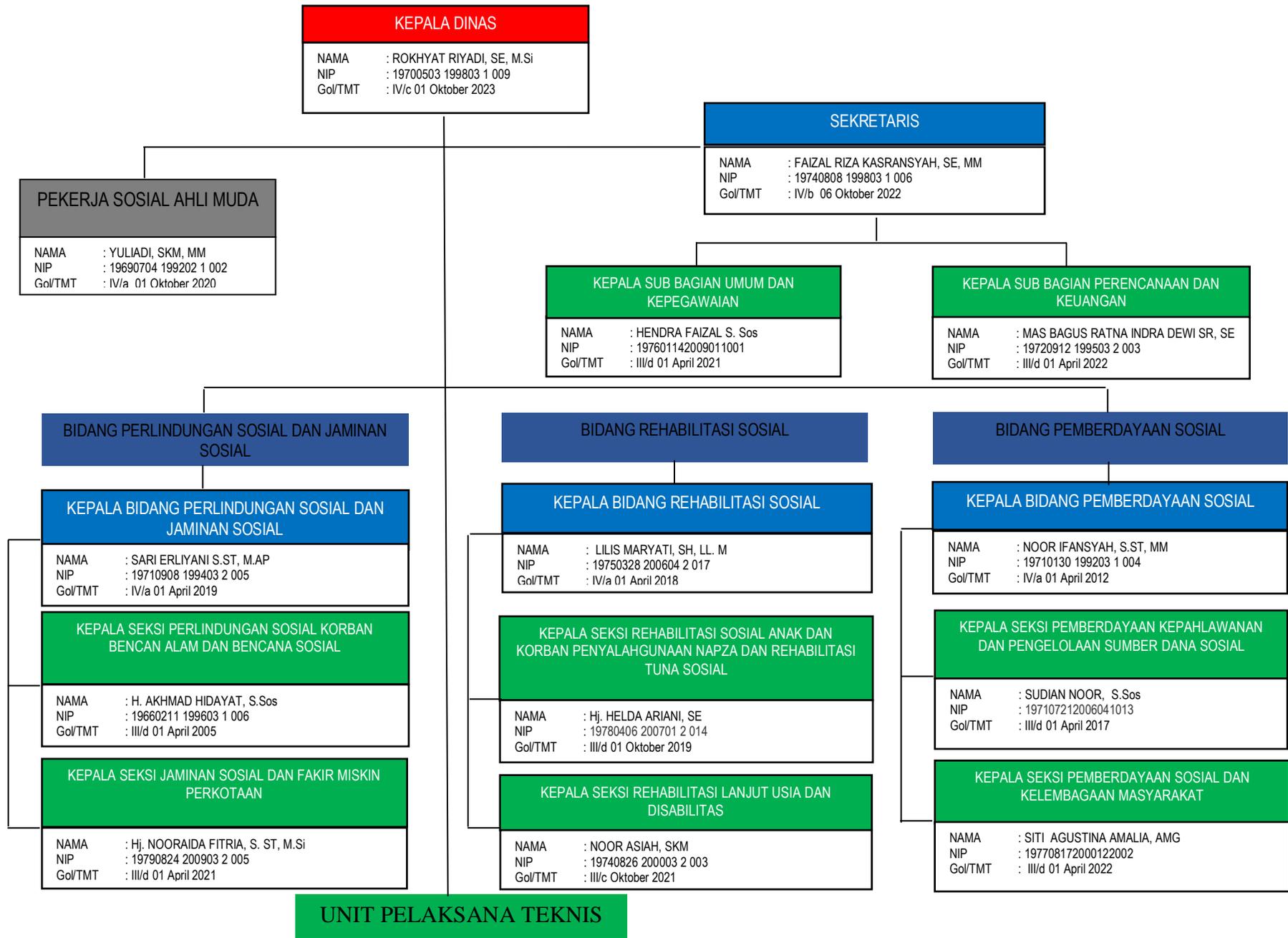
e. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

- 1) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat
- 2) Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

f. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Struktur Organisasi

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagai berikut :



1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis Organisasi

Aspek Strategis

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu ***Mewujudkan Banjarbaru Jujur, Agamis dan Sejahtera*** maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru

a. Tugas Pokok Dinas Sosial

Tugas pokok Dinas Sosial Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Sosial Kota Banjarbaru mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kebijaksanaan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial.
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesejahteraan sosial
5. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan

b. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Tujuan Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru adalah :

1. ***Meningkatkan Penanganan Korban Bencana***
2. ***Menurunkan Kemiskinan***

Sasaran adalah penjabaran dan implementasi dari tujuan pada tatanan yang lebih baik dan terarah, terperinci dan operasional sasaran menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, jelas dan terukur.

Sasaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3
- b. Meningkatnya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
- c. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin
- d. Meningkatnya penanganan korban bencana

Isu Strategis

Proses pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Sosial Kota Banjarbaru dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, faktor internal berupa kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan sumber daya yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pelayanan bidang sosial, sedangkan faktor eksternalnya adalah kebijakan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat menyangkut pembangunan bidang sosial dan faktor lainnya diluar faktor internal.

Setelah menganalisa dokumen beberapa dokumen dan kebijakan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan menelaah ketersediaan sumber daya maka Dinas Sosial mengambil langkah dan strategi memanfaatkan faktor pendorong untuk mengoptimalkan pelayanan bidang kesejahteraan sosial.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru adalah :

1. Perkuatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
Permasalahan perkuatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian saat ini. Hal ini tidak lepas akibat dari masih sangat kurangnya sarana dan prasarana terutama dibidang pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang merupakan faktor utama dari terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Peningkatan pelayanan publik dan pelayanan pada fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, bahwa seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru sebagai daerah yang mandiri dan berkarakter maka permasalahan sosial makin meningkat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu antisipasi secara komperehensif terhadap persoalan tersebut.
3. Perbaiki kualitas pelayanan publik
Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (good govermance) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kepastian hukum, transparan, partisipasif, akuntabel, memiliki kredibilitas bersih dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi rakyat, berkembangnya budaya perilaku birokrasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi pembangunan daerah.

Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan rumusan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Banjarbaru maka strategi yang dilaksanakan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah melaksanakan perkuatan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, berakhlak mulia, sopan dan santun baik dalam kelompok sosial maupun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi aktif dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), melalui organisasi sosial masyarakat , Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Karang Taruna, Lembaga-lembaga perlindungan sosial dalam pencegahan dan pelayanan serta rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
3. Meningkatnya, Rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti
4. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat adalah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk keluarga miskin
5. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam usaha pencegahan akibat bencana alam dan sosial

1.5. Sistematika Penyajian

Berdasarkan substansi sajian tersebut diatas, maka laporan kinerja ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Pendukung Capaian Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja Organisasi

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN :

1. SOP Pengumpulan data kinerja
2. SK Pengelola SAKIP
3. Indikator Kinerja Utama

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Secara umum Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada tahun 2023 sudah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Dari sasaran yang telah ditetapkan belum semuanya mencapai target kinerja yang diharapkan.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan	100%	Program Pemberdayaan Sosial
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial
3	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin	Persentase anak terlantar yang dipelihara Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	100%	Program Perlindungan Sosial
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah / kota	100%	Program Penanganan Bencana
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarbaru**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%
2	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%
3	Peningkatan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada SKPD	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
4	Peningkatan administrasi umum SKPD	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%
5	Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%
6	Peningkatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi	100%
7	Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Sosial Kota Banjarbaru**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	2 Paket
3	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket
4	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket
5	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen
6	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPKD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPKD	49 Laporan
7	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit

8	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit
9	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit
10	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat disediakan	3 Laporan
11	Terlaksananya penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	66 Laporan
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	14 Unit
14	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit
15	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
16	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor bangunan lainnya yang dipelihara	8 Unit

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Dinas Sosial Kota Banjarbaru

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan
3	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang/bulan	21 orang/bulan
4	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan

**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%
2.	Peningkatan Pengembangan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	15 dokumen

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45 orang
2.	Terlaksananya peningkatan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang
3	Terlaksananya peningkatan kemampuan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 lembaga
4	Terlaksananya peningkatan kemampuan kepada sumber daya manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan SDM dan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 sertifikat

**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya diluar panti	Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang diberikan di luar panti	100%
2.	Peningkatan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya bagi PMKS	Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS di luar panti	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5
1	Tersedianya penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	175 orang	180 orang
2	Tersedianya penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	71 orang
3	Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang
4	Terlaksananya pemberian pelayanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	13 orang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Rehabilitasi Tuna Sosial**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang
2	Tersedianya penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang

3	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang
4	Terlaksananya pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang
5	Terlaksananya pemberian reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang
6	Terlaksananya pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan	20 orang
7	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	3 dokumen

**PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan sosial kepada Anak-anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara di Kota Banjarbaru	100%
2.	Peningkatan pengelolaan data fakir miskin perkotaan	Persentase data fakir miskin yang dikelola	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Seksi Jaminanan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya pemberian penjangkauan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang
2	Terlaksananya pemberian rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	316 Orang	316 Orang
3	Terlaksananya pemberian pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	7.726 Orang	7.726 Orang
4	Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	4.390 keluarga	4.390 keluarga
5	Terlaksananya fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.580 keluarga	4.129 keluarga

**PROGRAM PENANGANAN BENCANA
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
2	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam dan sosial	Persentase masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan sosial	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000 orang
2	Terlaksananya penyediaan sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang
3	Terlaksananya pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang
4	Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang



Penanda Tangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

2.2 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kota Banjarbaru melaksanakan 5 (lima) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Sosial
5. Program Penanganan Bencana

yang terdiri dari 15 Kegiatan yang mana didalamnya terdapat sebanyak 45 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023
Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Sasaran Strategis	Kinerja	Indikator			Anggaran (Rp)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	20.260.000
				2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	54.715.000
	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Ketentuan		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.818.542.690 5.143.300
	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.700.00
	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 2. bahan logistik kantor	24.700.000 180.089.000

				3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.999.900
				4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.998.000
				5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	465.000.000
	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan		5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	213.107.000
				2. Pengadaan Mebel	34.970.000
				3. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.306.000
	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi		6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	125.704.500
				2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	326.485.480
	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik		7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.000.000
				2. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100.699.000
				3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	19.960.000
				4. Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	410.000.000

				5. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	7.500.000
Meningkatnya Kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan	Program Pemberdayaan Sosial	1. Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten / Kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	24.999.900
			2. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	2. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	305.238.000
				3. Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten / kota	35.999.900
				4. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / kota	159.748.300
				5. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	19.360.000
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1. Penyediaan permakanan 2. Penyediaan alat bantu 3. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	1.910.115.000 103.180.000 20.000.000

				4. Pemberian layanan kedaruratan	101.440.000
			2. Rehabilitasi sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial	1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2. Penyediaan permakanaan 3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 4. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 5. Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga 6. Pemberian Layanan Rujukan 7. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	93.760.000 350.000.000 146.565.900 14.999.800 74.999.000 280.999.900 59.999.700
Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin	Persentase anak terlantar yang dipelihara	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemeliharaan anak-anak terlantar	1. Penjangkauan anak-anak terlantar 2. Rujukan anak-anak terlantar	44.999.800 111.000.000
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial, kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat		2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota 3. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	121.250.000 266.400.800 1.653.207.900
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	1. Penyediaan makanan 2. Penyediaan sandang 3. Pelayanan Dukungan Psikososial	175.000.000 14.999.000 10.249.500
			2. Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	775.927.700

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup: kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja yang obyektif, akurat dan terpercaya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing kegiatan, dimana untuk pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kinerja, menggunakan rumus:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan **perbandingan** capaian kinerja sasaran strategis, antara **target** yang ditetapkan pada **Rencana Kinerja Tahunan atau Penetapan Kinerja**, dibandingkan dengan hasil **realisasi** semua kegiatan setelah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Pencapaian sasaran dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| – 85 s/d 100 % | = | Sangat baik/sangat berhasil |
| – 70 - < 85 % | = | Baik/berhasil |
| – 55 - < 70 % | = | Cukup berhasil |
| – < 55 % | = | Tidak berhasil |

Pengukuran pencapaian kinerja juga dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan capaian kinerja sasaran strategis, antara realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun yang lalu; membandingkan realisasi dengan capaian kinerja yang sama dengan daerah lain; membandingkan dengan ukuran standar nasional / provinsi seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pada Laporan Kinerja tahun 2023 adalah dengan menggunakan pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan wajib. Dalam melaksanakan tugas mengacu pada RPJMD Kota Banjarbaru yaitu pada misi 1 dan misi 2 sebagai berikut :

1. Misi 1

- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- Tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing berlandaskan nilai agama dan budaya.
- Sasaran meningkatnya keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat berlandaskan budaya.
- Indikator Persentase Penyelesaian Kebencanaan

2. Misi 2

- Meningkatnya pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Tujuan Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatnya ketersediaan pangan daerah.
- Sasaran Menurunnya kemiskinan.
- Indikator Angka Kemiskinan

3.2 PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Pencapaian sasaran strategis Menurunnya Kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2023 didukung dengan program-program sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dapat berperan aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

- PSM dan TKSK perpanjangan tangan dalam hal mendata/menjaring keluarga.
- Karang Taruna berperan dalam hal pengembangan kegiatan untuk dapat usaha ekonomi produktif dengan melibatkan anggota Karang Taruna dan masyarakat tidak mampu.
- LK3 berperan dalam hal penanganan kemiskinan lebih banyak memberikan saran, pendapat serta solusi atas permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT, anak terlantar dll).

2. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini melaksanakan kegiatan memberikan pendampingan dan pelayanan dan kepada PPKS yang diantaranya Orang terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), lansia terlantar, PSK, gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Banjarbaru, TNI/Polri dan ditampung sementara dirumah singgah serta pemulangan orang terlantar ketempat tinggal asalnya.

Program Rehabilitasi Sosial ini juga melaksanakan Program JUARA Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu Program HOMECARE bidang sosial yaitu:

- a. Penyediaan permakanan (sembako) kepada lansia dan penyandang disabilitas.
- b. Memberikan bantuan makanan siap saji kepada penyandang disabilitas dan lansia terlantar.
- c. Pemberian alat bantu kepada lansia dan penyandang disabilitas berupa kursi roda dan tongkat.
- d. Bantuan sewa rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini bertujuan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Program ini juga untuk menjamin fakir miskin, anak terlantar dan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial ekonomi agar terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Program Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial RI yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Bantuan Program Sembako dari APBD Kota Banjarbaru.

Dalam hal Penanganan kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarbaru bersama SKPD terkait yaitu: Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disdalduk, KBPMPPA, Dinas Koperasi UKM dan Naker, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas PUPR.

4. Program Penanganan Bencana

Program ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam penanganan akibat terjadi bencana alam dan sosial yang bertujuan agar kehidupan masyarakat yang mengalami bencana dapat pulih (trauma healing) sehingga diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.

Pada program Penanganan Bencana, terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru, yaitu:

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Makanan. Kegiatan ini melaksanakan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial dan apabila terjadi musibah banjir maka akan didirikan tenda penampungan di kelurahan setempat dan membuka dapur umum lapangan yang ada pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau relawan sosial yang dibentuk Dinas Sosial Kota Banjarbaru yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) berjumlah 27 orang. Apabila terjadi bencana alam dan sosial mereka akan turun langsung ke lokasi bencana bersama dengan BPBD dan relawan lainnya seperti TNI, Babinsa dan elemen masyarakat.

Program Penanganan Bencana melaksanakan kegiatan memberikan bantuan kepada korban pasca bencana yaitu memberikan makanan siap saji kepada korban yang terdampak bencana banjir dan paket sembako, makanan anak, velbet, matras, kasur, selimut kepada korban bencana.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian kinerja organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Banjarbaru dan Indikator Kinerja Pendukung.

Tabel. 3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemampuan Tenaga PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3	Persentase pekerja sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan	100%	101,4%	101,4%
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	160%	160%
3	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan keluarga miskin	persentase anak terlantar yang dipelihara dan persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	100%	100%	100%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	29%

1. MENINGKATNYA KEMAMPUAN PSKS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN LK3

Indikator persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawai, sosial maupun alami yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan menjaga, menciptakan mendukung dan memeperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Persentase pekerja sosial, tenaga sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dipilih untuk menggali potensi masyarakat yang

berpartisipasi dan dapat di dayagunakan untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Banjarbaru.

Tabel. 3.1

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemampuan Tenaga PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3	Persentase pekerja sosial , Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan	100%	101,4%	101,4%

Capaian Indikator Persentase tenaga sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan diukur berdasarkan perhitungan Jumlah Meningkatnya Kemampuan Tenaga PSKS, Kelembagaan Masyarakat dan LK3 dibagi Jumlah Tenaga PSKS, Kelembagaan Masyarakat dan LK3 dikali 100%. Adapun jumlah Kemampuan Tenaga PSKS, Kelembagaan Masyarakat dan LK3 dibagi Jumlah Tenaga PSKS, Kelembagaan Masyarakat dan LK3 sebanyak 68 Tenaga PSKS dibagi jumlah target 67 Tenaga PSKS = 101,4%.

Indikator Persentase pekerja sosial , Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan melaksanakan 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%	60%	60%
2	Peningkatan Pengembangan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kemampuannya	100%	108,2%	108,2%

Capaian Indikator Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota dan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kemampuannya ini sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% terealisasi 60% dan capaian 60% (jumlah capaian sub kegiatan dibagi jumlah target sub kegiatan di kali 100%).
2. Pengembangan Sumber Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kab/Kota dengan target 100% teralisasi 108,25% dan capaian 108,25 (jumlah capaian sub kegiatan dibagi jumlah target sub kegiatan di kali 100%).

Indikator Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota ini melaksanakan satu sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kemampuannya ini melaksanakan 4 sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab./Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Kab./Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab./Kota, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) sebagai berikut :

Tabel. 3.3

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	15 Dokumen	9 Dokumen	60%
2.	Terlaksananya peningkatan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	45 Orang	100%
3	Terlaksananya peningkatan kemampuan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	100%
4	Terlaksananya peningkatan kemampuan kepada sumber daya manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	4 Lembaga	133%
5	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan SDM dan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat	15 Sertifikat	100%

Capaian Indikator Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Ditingkatkan Kemampuannya ini total melaksanakan 5 (lima) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dengan target 15 dokumen terealisasi 9 dokumen dan capaian 60%.
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab./Kota dengan target 45 orang terealisasi 45 orang dan capaian 100%.
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Kab./Kota dengan target 5 orang terealisasi 5 orang dan capaian 100%.
4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab./Kota dengan target 3 lembaga terealisasi 4 lembaga dan capaian 133%.
5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) dengan target 15 sertifikat terealisasi 15 sertifikat dan capaian 100%.

Adapun sasaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdiri dari 12 Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Banjarbaru, yaitu :

No.	PSKS
1	Pekerja Sosial Profesional
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5	Karang Taruna
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7	Keluarga Pioner
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
10	Penyuluh Sosial
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12	Dunia Usaha

Sumber data bidang pemberdayaan sosial

Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada tahun 2023 juga melaksanakan Temu Karya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se Kalimantan Selatan dilaksanakan pada bulan November 2023 yang bertempat di wilayah Kelurahan Kemuning Kota Banjarbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk saling berbagi informasi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi PSKS yang ada di wilayah Kota Banjarbaru melalui forum diskusi dan pentingnya kebersamaan pada acara tersebut.



Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial

2. MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

Indikator Kinerja Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Indikator Kinerja Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dipilih dengan tujuan untuk membantu melayani, membina agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat dan penanganannya secara wajar.

Tabel. 3.4

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	173%	173%

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti diukur berdasarkan perhitungan Jumlah PPKS yang terlayani dibagi dengan Jumlah target PPKS yang dilayani dikali 100%. Adapun Jumlah PPKS yang terlayani 950 orang dibagi jumlah target PPKS yang dilayani 548 orang di kali 100% = 173%.

Indikator Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti melaksanakan 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.5

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang diberikan bagi Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	100%	100%	100%
2.	Peningkatan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya bagi PPKS	Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di luar panti	100%	449%	449%

Capaian Indikator Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti :

1. Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang diberikan bagi Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti dengan target 100% Realisasi 100% Capaian 100%, (jumlah capaian sub kegiatan dibagi jumlah target sub kegiatan di kali 100%).
2. Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di luar panti dengan target 100% Realisasi 449% Capaian 449%, (jumlah capaian sub kegiatan dibagi jumlah target sub kegiatan di kali 100%).

Indikator Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ini melaksanakan 4 sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan;
 - Penyediaan alat bantu;
 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Geelandangan, Pengemis dan Masyarakat;
 - Pemberian Layanan Kedaruratan;
- dan Indikator Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di luar panti ini melaksanakan 7 sub kegiatan :
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - Penyediaan Permakanan;
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
 - Pemberian Reunifikasi Keluarga;
 - Pemberian Layanan Rujukan;
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota;

Tabel. 3.6

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 orang	180 orang	100%
2.	Tersedianya penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	71 orang	71 orang	100%
3.	Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100%
4.	Terlaksananya pemberian pelayanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	13 orang	100%
5.	Terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	252 orang	1260%
6.	Tersedianya penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	156 orang	104%

7.	Terlaksananya pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	27 orang	675%
8.	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	79 orang	395%
9.	Terlaksananya pemberian reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	90 orang	450%
10.	Terlaksananya pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan	20 orang	32 orang	160%
11.	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	3 dok	3 dok	100%

Capaian Indikator Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang diberikan bagi Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti dan Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di luar panti total melaksanakan 11 sub kegiatan:

1. Penyediaan Permakanan dengan target 180 orang terealisasi 180 orang dengan capaian 100%.
2. Penyediaan Alat Bantu dengan target 71 orang terealisasi 71 orang dengan capaian 100%.
3. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat dengan target 50 orang realisasi 50 orang dan capaian 100%.
4. Pemberian Layanan Kedaruratan dengan target 13 orang terealisasi 13 orang dan capaian 100%.
5. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dengan target 20 orang terealisasi 252 orang dan capaian 1260%.
6. Penyediaan Permakanan dengan target 150 orang terealisasi 156 orang dengan capaian 104%.
7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan target 4 orang terealisasi 27 orang dengan capaian 675%
8. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan target 20 orang terealisasi 79 orang dengan capaian 395%
9. Pemberian Reunifikasi Keluarga dengan target 20 orang terealisasi 90 orang dengan capaian 450%

10. Pemberian Layanan Rujukan dengan target 20 orang terealisasi 32 orang dengan capaian 160%

11. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota dengan target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen dengan capaian 100%.

Sub kegiatan ini diantaranya melaksanakan program “Juara” Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu Program HOMECARE bidang sosial sebagai berikut :

- Penyediaan permakanan melaksanakan pemberian bantuan makanan siap saji dan sembako kepada para penyandang disabilitas dan lansia yang ada di wilayah Kota Banjarbaru.
- Pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia (kursi roda dan tongkat).
- Pemberian layanan kedaruratan berupa bantuan sewa rumah kepada penyandang disabilitas dan lansia.



Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial

Adapun sasaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 26 jenis PPKS, sebagai berikut :

No	Jenis PMKS
1	Anak Balita Terlantar
2	Anak Terlantar
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
4	Orang Terlantar
5	Anak dengan Kedisabilitas
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)
8	Lanjut Usia Terlantar
9	Penyandang Disabilitas
10	Wanita Tuna Susila
11	Gelandangan
12	Pengemis
13	Pemulung
14	Kelompok Minoritas
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
16	HIV/AIDS
17	Korban Penyalahgunaan Napza
18	Korban Trafficking
19	Korban Tindak Kekerasan
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial
21	Korban Bencana Alam
22	Korban Bencana Sosial
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24	Fakir Miskin
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26	Komunitas Adat Terpencil

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial

3. MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN

Indikator Persentase anak terlantar yang dipelihara dan Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 -18 tahun meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga. Indikator Kinerja Persentase anak terlantar yang dipelihara dipilih dengan tujuan untuk membantu anak terlantar mendapatkan jaminan, perlindungan dan pemeliharaan serta pembinaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan / atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.

Indikator Kinerja Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk membantu melayani , membina dan memberikan bantuan agar dapat melaksanakan peran sosialnya di masyarakat

Tabel. 3.7

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin	- Persentase anak terlantar yang dipelihara - Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial, kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	100%	100%	100%

Capaian Kinerja Indikator Persentase anak terlantar yang dipelihara dan Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial, kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat diukur berdasarkan perhitungan Capaian Kinerja Indikator Persentase anak terlantar yang dipelihara diukur berdasarkan perhitungan $\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan}}{\text{Jumlah target anak terlantar}} \times 100\%$ dan Indikator Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial, kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat $\frac{\text{Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan}}{\text{Jumlah target Fakir Miskin}} \times 100\%$.

Adapun jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan dibagi jumlah target anak terlantar di kali 100% sebanyak 336 orang di bagi target anak yang mendapatkan bantuan sebanyak 316 orang dikali 100% = 100% dan Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan dibagi Jumlah target Fakir Miskin di kali 100% sebanyak 16.245 orang di bagi jumlah target fakir miskin sebanyak 16.245 orang dikali 100% = 100%. Dari capaian indikator tersebut dijumlah kemudian dibagi 2 yaitu target 100% realisasi 100% dengan capaian 100%.

Indikator Persentase anak terlantar yang dipelihara dan Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial, kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat ini melaksanakan 2 kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.8

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Pelayanan sosial kepada Anak-anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara di Kota Banjarbaru	100%	100%	100%
2.	Peningkatan pengelolaan data fakir miskin perkotaan	Persentase data fakir miskin yang dikelola	100%	100%	100%

Capaian Indikator Persentase anak terlantar yang dipelihara dan Persentase data fakir miskin yang dikelola :

1. Persentase anak terlantar yang dipelihara di Kota Banjarbaru dengan target 100% Realisasi 100% Capaian 100%, (jumlah capaian sub kegiatan dibagi jumlah target sub kegiatan di kali 100%).
2. Persentase data fakir miskin yang dikelola dengan target 100% Realisasi 100% Capaian 100%, (jumlah capaian sub kegiatan dibagi jumlah target sub kegiatan di kali 100%).

Indikator Persentase anak terlantar yang dipelihara ini melaksanakan 2 sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rujukan Anak-Anak Terlantar dan Indikator Persentase data fakir miskin yang dikelola ini melaksanakan 3 sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut :

Tabel. 3.9

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya pemberian penjangkauan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100%
2.	Terlaksananya pemberian rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	316 Orang	316 Orang	0%
3.	Terlaksananya pemberian pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	7.726 Orang	7.726 Orang	100%
4.	Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	4.390 keluarga	4.390 keluarga	100%
5.	Terlaksananya fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4129 keluarga	4129 keluarga	100%

Capaian Indikator Persentase anak terlantar yang dipelihara dan Indikator Persentase data fakir miskin yang dikelola ini total melaksanakan 5 sub kegiatan :

1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar dengan target 20 orang terealisasi 20 orang dengan capaian 100%.
2. Rujukan Anak-Anak Terlantar dengan target 316 orang terealisasi 316 orang dengan capaian 100%.
3. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./Kota dengan target 7.726 orang terealisasi 7.726 orang dengan capaian 100%.
4. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./Kota dengan target 4.390 orang terealisasi 4.390 orang dengan capaian 100%.
5. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target 4.129 ang terealisasi 4.129 orang dengan capaian 100%.



Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

4. MENINGKATNYA PEMBERIAN KEBUTUHAN DASAR BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

Indikator Kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, keuangan harta benda dan dampak psikologis.

Indikator Kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dipilih dengan tujuan untuk membantu para korban bencana alam dan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat bencana.

Tabel. 3.10

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	29%	29%

Capaian Kinerja Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah diukur berdasarkan perhitungan Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan dibagi Jumlah korban bencana dikali 100%.

Adapun korban bencana alam dan sosial yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasarnya sebanyak 1.182 orang dibagi jumlah target korban bencana sebanyak 4.100 orang dikali 100% = 29%.

Adapun penanganan pasca bencana alam dan sosial yang ditangani pada tahun 2023 :

Tabel. 3.11

Bencana Alam Yang Ditangani, 2023

No	Jenis Bencana	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
1	Banjir	65	Kelurahan Landasan Ulin Selatan (6 Ferbuari 2023)
2	Kebakaran	25	Kelurahan Landasan Ulin Utara 1 buah rumah, 2 KK 5 jiwa (24 Januari 2023) Kelurahan Sungai Tiung 2 buah rumah, 2 KK 9 Jiwa (27 Juli 2023) Kelurahan Landasan Ulin Tengah 2 buah rumah, 4 KK, 10 jiwa (14 Agustus 2023)
3	Karhutla	1092	Kelurahan Landasan Ulin Selatan 150 jiwa (3 Oktober 2023) Kelurahan Landasan Ulin Selatan 100 jiwa (4 Oktober 2023) Kelurahan Landasan Ulin Barat 100Jiwa (5 Oktober 2023) Kelurahan Landasan Ulin Timur 100 jiwa (06 Oktober 2023) Kelurahan Landasan Ulin Selatan 100 jiwa (07 Oktober 2023) Kelurahan Guntung Manggis 100 jiwa (08 Oktober 2023) Kelurahan Landasan Ulin Timur 75 jiwa (09 Oktober 2023) Kelurahan Loktabat Utara 75 Jiwa (10 Oktober 2023) Kelurahan Guntung Manggis 100 jiwa (11 Oktober 2023) Kelurahan Landasan Ulin Barat 100 Jiwa (12 Oktober 2023) Kelurahan Loktabat Utara 85 Jiwa (13 Oktober 2023)

Selama tanggap darurat bencana tahun 2023 kejadian bencana di Kota Banjarbaru relatif kecil bila dibandingkan pada tahun 2022, anggaran yang disediakan dan target yang ditentukan bersifat perkiraan sementara pada tahun sebelumnya untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut sehingga realisasi dan capaian kinerja maupun realisasi anggaran yang tercapai tidak sepenuhnya dapat terealisasi sesuai target.

Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana ini melaksanakan 2 kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.12

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	29%	29%
2.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam dan sosial	Persentase masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan sosial	100%	90%	90%

Capaian Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan sosial:

1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target 100% Realisasi 29% Capaian 29%, (jumlah capaian sub kegiatan dibagi jumlah target sub kegiatan di kali 100%).
2. Persentase data fakir miskin yang dikelola dengan target 100% Realisasi 100% Capaian 100%, (jumlah capaian sub kegiatan dibagi jumlah target sub kegiatan di kali 100%).

Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ini melaksanakan 3 sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Pelayanan Dukungan Psikososial dan Persentase masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan sosial ini melaksanakan 1 sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana sebagai berikut :

Tabel. 3.13

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya penyediaan permakanaan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	1092 Orang	27,3%
2.	Terlaksananya penyediaan sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	24 Orang	48%
3.	Terlaksananya pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	66 Orang	132%
4.	Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	27 Orang	90%

Capaian Indikator Persentase anak terlantar yang dipelihara dan Indikator Persentase data fakir miskin yang dikelola ini total melaksanakan 4 sub kegiatan :

1. Penyediaan Permakanan dengan target 4.000 orang terealisasi 1.092 orang dengan capaian 27,3%
2. Penyediaan Sandang dengan target 50 orang terealisasi 24 orang dengan capaian 48%.
3. Pelayanan Dukungan Psikososial dengan target 50 orang terealisasi 66 orang dengan capaian 132%.
4. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan target 30 orang terealisasi 27 orang dengan capaian 90%.



Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah bertujuan membantu penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk mencapai capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja utama.

Tabel 3.14

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi dan capaian 100%. Indikator Predikat Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melaksanakan 7 kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.15

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	100%
2.	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%
3.	Peningkatan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada SKPD	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%
4.	Peningkatan administrasi umum SKPD	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	100%
5.	Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	100%
6.	Peningkatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%
7.	Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%

Indikator Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD, Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan, Persentase laporan barang

milik daerah yang disusun sesuai ketentuan, Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi, Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan, Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi, Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik ini terealisasi 100% dan capaian 100%. Indikator ini melaksanakan 20 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.16

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
3.	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	21 orang/bulan	100%
4.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.	Terlaksananya Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
6.	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
7.	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
8.	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
9.	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
10.	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPKD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPKD	49 Laporan	49 Laporan	100%
11.	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	4 Unit	100%
12.	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
13.	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	5 Unit	100%
14.	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%

15.	Terlaksananya penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	66 Laporan	66 Laporan	100%
16.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
17.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	14 Unit	14 Unit	100%
18.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	25 Unit	100%
19.	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
20.	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor bangunan lainnya yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dengan 2 Tahun Sebelumnya

Tabel. 3.2
Perbandingan Kinerja

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Capaian Target akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase pekerja sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan	100%	100%	100%	100%	83%	83%	100%	101.4%	101.4%	100%
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	69,2%	69,2%	100%	83%	83%	100%	173%	173%	100%
3	Persentase anak terlantar yang dipelihara dan persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	100%	100%	100%	100%	87%	87%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	100%	98,3%	98,3%	100%	29%	29%	100%

Pada tahun 2023 Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan, Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase anak terlantar yang dipelihara dan persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan realisasi dan capaian sebesar 101,4%, 173%, 100% yang mana sebelumnya pada tahun 2022 realisasi dan capaian sebesar 83%, 83%, 87% dan tahun 2021 sebesar 100, 69,2, 87%. Sedangkan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 29% yang mana tahun 2022 sebesar 98,3% dan Tahun 2021 sebesar 100%.

3. Perbandingan kinerja dengan Kabupaten/ Kota/ Provinsi

Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan skala Kabupaten/Kota/Propivinsi dilaksanakan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Tabel. 3.3

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Realisasi			
			Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
1	Persentase pekerja sosial , Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan	101,4%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	173%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase anak terlantar yang dipelihara dan persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	29%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan, Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase anak terlantar yang dipelihara dan persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga, Kabupaten/ Kota/Provinsi mengalami peningkatan hanya satu indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota yang mengalami penurunan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Nasional

Realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2023 dan Target Nasional tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 3.4

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMD Tahun 2023	Target Nasional
1	Persentase pekerja sosial , Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan	101,4%	100%	100%
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	173%	100%	100%
3	Persentase anak terlantar yang dipelihara dan persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	100%	100%	100%
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	29%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan, Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase anak terlantar yang dipelihara dan persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga, Kabupaten/

Kota/Provinsi mengalami peningkatan hanya satu indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota yang mengalami penurunan dibandingkan dengan target RPJMD dan Nasional, tetapi secara keseluruhan sudah baik nilai capaiannya.

5. Analisa keberhasilan dan kegagalan

Upaya-Upaya

a. Program Pemberdayaan Sosial

- Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lebih aktif dan inovatif;
- Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga terdorong untuk menjadi relawan sosial (PSM, KT, Tagana, LKS dll);
- Peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) relawan sosial;
- Adanya Tambahan Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada 1 (Satu) Kelurahan;
- Terlaksananya Temu Karya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se Kalsel ke XIX di Kota Banjarbaru;

b. Program Rehabilitasi Sosial

- Memberikan bantuan Makanan Siap Saji bagi Lansia dan Disabilitas;
- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota/Provinsi dalam penanganan PPKS;
- Melibatkan masyarakat, TNI/Polri, Kelurahan untuk membantu penanganan PPKS;
- Adanya rumah singgah sebagai wadah penampungan sementara PPKS untuk mendapatkan rekomendasi selanjutnya;
- Tersedianya sarana dan prasarana operasional yang memadai berupa mobil operasional TRC;
- Adanya pendamping rehabilitasi sosial Kemensos RI yang membantu melakukan assesment dan pendampingan PPKS;
- Dibentuknya tim kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dengan melibatkan unsur TNI/POLRI;
- Melibatkan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI dan Sentra Budi Luhur Kementerian

Sosial RI dalam membantu penanganan permasalahan sosial PPKS;

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Peningkatan Sumber Daya Manusia yang terampil dan professional seperti Pelatihan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) bagi Operator SIKS NG dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) yang diselenggarakan oleh Pusdiklatbangprof bersama Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di BBPPKS Banjarmasin, Bimbingan Pemantapan Data Terpadu Sosial Banua (DATU SOBAN) bagi Supervisor dan Petugas Data yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;
- Melaksanakan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK);
- Tersedianya sarana dan prasarana operasional lapangan untuk pelayanan kepada PPKS;
- Bertambahnya jumlah Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan dalam pendampingan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru;
- Sinergi dengan Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Banjarbaru dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPJS Kesehatan dalam kegiatan penanganan fakir miskin;
- Melaksanakan Program Jaminan Sosial baik berupa Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sembako;

d. Program Penanganan Bencana

- Terjalinnnya koordinasi antar instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana ;
- Tersedianya sarana dan prasarana mobil operasional lapangan untuk tanggap darurat bencana ;
- Tersedianya makanan siap saji untuk korban bencana dan relawan ;
- Adanya Lumbung Sosial di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka;

- Tersedianya penyediaan sandang untuk tanggap darurat bencana bagi korban yang terkena bencana ;
- Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban bencana dan sosialisasi pelayanan dukungan sosial kepada relawan sosial ;

6. Hambatan-Hambatan

a. Program Pemberdayaan Sosial

- Masih belum terbentuknya Puskesmas pada tiap-tiap kelurahan (sementara hanya 3 kelurahan saja);
- Masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi Puskesmas-SLRT;

b. Program Rehabilitasi Sosial

- Masih ada permasalahan sosial PPKS yang belum dapat terbantu karena Keterbatasan anggaran yang tersedia;
- Laporan masyarakat tidak mengenal waktu sedangkan jam kerja terbatas;
- Kurangnya SDM yang dimiliki khususnya untuk petugas dan driver yang standby pada malam hari, karena seringkali laporan masyarakat terjadi pada malam hari;

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Penetapan DTKS dan Penerima Bantuan Sosial ditentukan oleh Kementerian Sosial RI;
- Terbatasnya Keuangan Daerah untuk merefleksi program kegiatan Pemerintah Pusat;
- Data di DTKS tidak hanya data fakir miskin saja tetapi terdapat juga data pemberdayaan sosial/potensi sumber kesejahteraan sosial;
- Penduduk miskin dan tidak mampu masih ada yang belum memiliki NIK yang valid;
- Penduduk miskin dan tidak mampu tinggal berpindah-pindah (tidak memiliki tanah sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah);

d. Program Penanganan Bencana

- Kurangnya informasi saat terjadinya bencana karena tidak memiliki sarana komunikasi yang bersifat permanen (Radio pemancar frekuensi dan radio Handy Talkie) untuk mengetahui

- kapan dan dimana ada kejadian bencana, sementara alat komunikasi yang digunakan hanya via whatsapp yang terbatas pada jaringan internet;
- Perlunya pelatihan keterampilan untuk Anggota Tagana dalam penanganan bencana;
 - Persentase Bencana yang terjadi di Kota Banjarbaru mengalami penurunan, sehingga pembukaan dapur umum lebih sedikit dari jadwal perkiraan yang sudah ada;
 - Target yang ditetapkan pada sub kegiatan penyediaan permakanan masih mengacu dari kejadian pada tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan terlalu tinggi sedangkan bencana yang terjadi relatif rendah pada tahun 2023 dan capaian tidak sepenuhnya terealisasi.

7. Rencana Tindak Lanjut

- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - Memberikan pengetahuan tentang ijin kepada organisasi masyarakat ataupun pihak lainnya yang melakukan aksi pengumpulan uang atau barang;
 - Membuat edaran kembali agar dapat dibentuknya Puskesos SLRT pada masing-masing Kelurahan;
 - Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Puskesos SLRT;
 - Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait;
 - Membuat program kegiatan inovasi untuk tahun 2024;
- b. Program Rehabilitasi Sosial
 - Merubah pola dan keanggotaan tim kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial agar penanganan permasalahan sosial PPKS dapat lebih cepat tertangani;
 - Melibatkan unsur swasta dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial;
 - Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan guna perbaikan kedepannya;
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, Kmenterian/Lembaga terkait baik vertikal maupun horisontal serta SKPD terkait;
 - Menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar;

- Bersinergi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam penanganan Anak dan Balita Terlantar;
 - Membuat kegiatan-kegiatan penanganan fakir miskin melalui anggaran APBD Kota Banjarbaru;
 - Membantu penduduk miskin dan tidak mampu agar memiliki KTP-EI dan NIK yang valid;
 - Mengusulkan penduduk miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan bantuan, baik itu berupa program jaminan sosial atau program pemberdayaan sosial;
- d. Program Penanganan Bencana
- Penambahan buffer stock kebencanaan dari APBD Kota Banjarbaru maupun dari Kementerian Sosial RI;
 - Penambahan sarana dan prasarana alat informasi terkait bencana yang terjadi;
 - Pelatihan bagi anggota Tagana tentang kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;
 - Berkoordinasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan penyelesaian kebencanaan;

8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Dalam upaya kegiatan untuk mengurangi dan menurunkan angka kemiskinan serta pelayanan kepada PPKS di wilayah Kota Banjarbaru diperlukan berbagai kegiatan yang mendukung seperti Penyediaan Alat Bantu untuk penyandang disabilitas dan lansia, untuk mendorong dan mendukung upaya tersebut dilakukan refocusing anggaran belanja modal alat kedokteran lainnya sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya ke Belanja Hibah Barang Kepada Organisasi Masyarakat. Belanja Hibah Barang Kepada Organisasi Masyarakat ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam aktifitas keseharian khususnya bagi peyandang disabilitas dan lansia yang ada diwilayah Kota Banjarbaru dan berkerjasama dengan Yayasan yang ada di Kota Banjarbaru.

9. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya Persentase Pekerja Sosial , Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat Dan Lk3 Yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan, Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar

Serta Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhannya Di Luar Panti, Persentase Anak Terlantar Yang Dipelihara Dan Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota tahun 2023 **Rp. 12.241.319.970** dengan relisasi anggaran sebesar **Rp. 11.189.263.084** atau **91,41%**.

Tabel. 3.5

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			REALISASI (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	5.366.879.870	5.166.356.884	96,26
2.	Program Pemberdayaan Sosial	545.346.100	530.876.100	97,35
3.	Program Rehabilitasi Sosial	3.156.059.300	2.795.314.700	88,57
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.196.858.500	1.879.454.900	85,55
5.	Program Penanganan Bencana	976.176.200	817.260.500	83,72
Jumlah		12.241.319.970	11.189.263.084	91,41

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai dan Program pendukung urusan pemerintahan daerah berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Meningkatnya kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3 dengan Indikator Persentase pekerja sosial , Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan :

- a. Capaian Program Pemberdayaan Sosial dengan sasaran Meningkatkan kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3 dengan capaian Target 100% Realisasi 101,4% dan Capaian 101,4%
- b. Capaian Kegiatan
 - Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota Indikator Persentase pekerja sosial , Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan Target 100% Realisasi 60% Capaian 60%
 - Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten / kota Indikator Persentase pekerja sosial , Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan Target 100% Realisasi 108,2% Capaian 108,2%

c. Capaian Sub Kegiatan

- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang Target 15 dokumen Realisasi 9 dokumen Capaian 60%
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota Target 45 orang Realisasi 45 orang Capaian 100%
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan kewenangan kabupaten / kota Target 5 orang Realisasi 5 orang Capaian 100%
- Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota Target 3 Lembaga Realisasi 4 Lembaga Capaian 108,2%
- Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Target 15 sertifikat Realisasi 15 sertifikat Capaian 100%.

Dari hasil capain diatas secara keseluruhan dari jumlah tenaga PSKS yang ditingkatkan kemampuannya terealisasi 68 tenaga PSKS dari target 67 tenaga PSKS, sehingga dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial dengan Sasaran Program Meningkatnya Kemampuan Tenaga PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3 sebesar 101,4%

2. Program Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti dengan indikator kinerja persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti :

- a. Capaian Program Rehabilitasi Sosial dengan sasaran program Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti dari jumlah PPKS yang terlayani sebanyak 950 orang dari jumlah target 548 orang PPKS dengan Realisasi 173% Capaian 173%.
- b. Capaian Kegiatan
 - Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti Indikator Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang diberikan di luar panti target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%
 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial Indikator Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS di luar panti target 100% terealisasi 449% dengan capaian 449%
- c. Capaian Sub Kegiatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan target 180 orang terealisasi 180 orang dengan capaian 100%. Sub kegiatan ini melaksanakan pemberian bantuan makanan siap saji dan sembako kepada lansia dan penyandang disabilitas.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu target 71 orang teralisasi 71 orang dengan capaian 100%. Sub kegiatan ini melaksanakan pemberian alat bantu berupa kursi roda dan tongkat kepada lansia dan penyandang disabilitas.
 - Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kab./Kota terealisasi 50 orang dengan capaian 100% dari target 50 orang.

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan target 13 orang terealisasi 13 orang dengan capaian 100%. Sub kegiatan ini melaksanakan pemberian bantuan sewa rumah kepada lansia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu.
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan data dan Pengaduan target 20 orang terealisasi 252 orang dengan capaian 1260%. Sub Kegiatan ini melaksanakan pemberian layanan dan pengaduan dalam hal penanganan PPKS.
- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan target 150 orang terealisasi 156 orang dengan capaian 104%. Sub Kegiatan ini memberikan permakanan kepada PPKS yang masuk ke dalam rumah singgah.
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar target 4 orang terealisasi 27 orang dengan capaian 675%. Sub Kegiatan ini melaksanakan pemberian bantuan untuk anak yang ingin masuk pondok pesantren.
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga target 15 orang terealisasi 79 orang capaian 395%. Sub Kegiatan ini melaksanakan penelusuran keluarga PPKS yang masuk dirumah singgah.
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga target 20 orang terealisasi 90 orang dengan capaian 450%. Sub Kegiatan ini melaksanakan pemulangan PPKS kepada keluarganya.
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan target 20 orang terealisasi 32 orang dengan capaian 160%. Sub Kegiatan ini melaksanakan pemberian rujukan kepada PPKS sesuai dengan kondisi PPKS tersebut.
- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupate/Kota target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen dengan capaian

100%. Sub Kegiatan ini melaksanakan koordinasi antar instansi pemerintah, TNI, POLRI, maupun pihak swasta dalam penanganan PPKS.

Dari hasil capaian di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial dengan Sasaran Program Meningkatnya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sebesar 173%.

3. Program Perlindungan Sosial

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin dengan indikator kinerja persentase anak terlantar yang dipelihara dan persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga :

- a. Capaian Program Perlindungan Sosial dengan sasaran program Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin dari jumlah orang yang mendapatkan bantuan sebanyak 16.245 dari jumlah anak terlantar dan fakir miskin yang mendapatkan bantuan 16.245 terealisasi 100% capaian 100%
- b. Capaian Kegiatan
 - Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dengan indikator kinerja persentase anak terlantar yang dipelihara target 100% terealisasi 100% capaian kinerja 100%
 - Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial target 100% terealisasi 100% capaian kinerja 100%
- c. Capaian Sub Kegiatan
 - Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar Target 20 orang terealisasi 20 orang capaian 100%. Sub kegiatan ini

melaksanakan pelatihan keterampilan kepada anak-anak terlantar.

- Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar target 316 orang terealisasi 316 orang dengan capaian 100%. Sub Kegiatan ini melaksanakan pemberian bantuan sembako kepada LKSA.
- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota target 7.726 orang teralisasi 7.726 orang dengan capaian 100%. Sub Kegiatan ini melaksanakan pendataan DTKS dan JKN.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota target 4.390 orang terealisasi 4.390 orang dengan capaian 100%. Sub Kegiatan ini melaksanakan pengelolaan data PKH.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga target 4.129 orang terealisasi 4.129 orang dengan capaian 100%. Sub Kegiatan ini melaksanakan pemberian paket sembako tali asih dan inflasi.

Dari hasil capain diatas secara keseluruhan dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Perlindungan Sosial dengan indikator kinerja persentase anak terlantar yang dipelihara dan persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga sebesar 100%.

4. Program Penanganan Bencana

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial dengan indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota terealisasi :

- a. Capaian Program Penanganan Bencana dengan sasaran program Meningkatnya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial dari

jumlah 4.100 orang yang akan mendapatkan bantuan terealisasi 1.182 orang dengan capaian 29%

b. Capaian Kegiatan

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota target 100% teralisasi 29% capaian kinerja 29%
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota target 100% terealisasi 90% capaian kinerja 90%

c. Capaian Sub Kegiatan

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan target 4.000 orang terealisasi 1.092 orang dengan capaian 27,3%. Sub Kegiatan ini melaksanakan pemberian makanan siap saji kepada korban bencana alam dan sosial.
- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang target 50 orang terealisasi 24 orang dengan capaian 48%. Sub kegiatan ini melaksanakan pemberian bantuan sandang diantaranya berupa matras, selimut, pakaian dan velbed.
- Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial target 50 orang terealisasi 66 orang dengan capaian 132%. Sub Kegiatan ini melaksanakan layanan trauma healing kepada korban bencana.
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana target 30 orang terealisasi 27 orang capaian kinerja 90%. Sub kegiatan ini melaksanakan pembinaan kepada anggota TAGANA.

Dari hasil capaian diatas secara keseluruhan dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota sebesar 29%.

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Tenaga PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3	Persentase pekerja sosial , Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Kemampuan	100%	101,4%	101,4	Sangat Baik
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	173%	173%	Sangat Baik
3	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan keluarga miskin	persentase anak terlantar yang dipelihara dan persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	100%	100%	100%	Sangat Baik
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	29%	29%	Tidak Berhasil

Dari 4 (empat) Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar **100,8%** dengan interpretasi : **Sangat baik/sangat berhasil.**

Dari Capaian 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), 4 Program, 8 kegiatan dan 17 Sub kegiatan. Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator outcome yang telah ditetapkan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan **perbandingan** capaian kinerja sasaran strategis, antara **target** yang ditetapkan pada **Rencana Kinerja Tahunan atau Penetapan Kinerja**, dibandingkan dengan hasil **realisasi** semua kegiatan setelah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Pencapaian sasaran dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| – 85 s/d 100 % | = | Sangat baik/sangat berhasil |
| – 70 - < 85 % | = | Baik/berhasil |
| – 55 - < 70 % | = | Cukup berhasil |
| – < 55 % | = | Tidak berhasil |

Program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru selama 1 tahun banyak hal yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Kendala dan hambatan yang dihadapi senantiasa menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.

Meskipun disusun secara sederhana Laporan Kinerja tahun 2023 ini diharapkan mampu membangun kebersamaan sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Berikut permasalahan yang masih harus dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru diharapkan agar ke depannya bisa dapat teratasi, di antaranya :

1. Masih kurangnya peningkatan kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk berperan aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial.
2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya penanganan peningkatan kesejahteraan sosial diantaranya

kurangnya kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan bidang pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang memadai untuk penanggulangan korban pasca bencana.
4. Belum memiliki tempat penampungan yang tetap sesuai fungsinya bagi korban bencana.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya ada beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada selama ini. Akan tetapi hal ini tidak akan terwujud apabila tidak ada koordinasi dan kerjasama yang baik, oleh karena itu diharapkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah dan Instansi yang terkait dalam penanganan masalah bidang sosial.

Perlu Penanganan terpadu oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perlu inovasi program dan kegiatan pada Dinas Sosial khususnya Pemerintah Kota Banjarbaru.

1. Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sosial kepada masyarakat terutama para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan memberikan kemudahan dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya.
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan PPKS (Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Disdukapil, Disdalduk,KB, PMP & PA, BPJS, dan RSDI Banjarbaru, RSJ Sambang Lihum, Kepolisian).
4. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dengan melakukan bimbingan teknis agar adanya peningkatan kemampuan SDM dalam menangani permasalahan sesuai dengan bidang

keahliannya dan mengajukan penambahan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparat.

5. Penanganan PPKS lebih mengacu kepada data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
6. Penambahan sarana dan prasarana operasional lapangan bagi korban pasca bencana.
7. Penambahan Inovasi kegiatan dan anggaran.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

Nomor SOP : 800/048 -01/Dinsos

Tgl Pembuatan : 25 Januari 2023

Tgl Revisi : -

Tgl Efektif : -

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Sosial

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

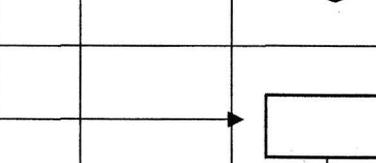
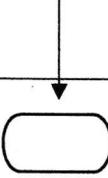


Nama SOP : Pengelolaan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan	: Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional pengumpulan data kinerja dan keuangan triwulan di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
Ruang Lingkup	: Prosedur ini berkaitan dengan kegiatan operasional pengumpulan data kinerja dan keuangan triwulan di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
Definisi	: <ul style="list-style-type: none">• Data Kinerja : Sasaran, indicator, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja tiap triwulan• Data Keuangan : Program/Kegiatan, anggaran, realisasi dan persentase penyerapan anggaran kumulatif tiap triwulan
Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none">1) Kepala Dinas Sosial : Menetapkan kebijakan yang terkait dengan kinerja dan keuangan.2) Sekretaris : Menetapkan kebijakan yang terkait dengan operasional pengumpulan data kinerja dan keuangan3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : Melakukan arahan teknis pengelolaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.4) Kepala Sub Bidang : Melakukan kegiatan operasional pengumpulan data sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.5) Kepala Seksi : Melakukan kegiatan teknis operasional pengumpulan data sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Unit/Instansi Yang Terkait	: Sekretaris, Kepala Bidang / Kepala Seksi, Kasubbag Perencanaan & Keuangan selaku Pengelola Urusan SAKIP dan LAPORAN TAHUNAN di lingkungan Dinas Sosial

Dasar Hukum & Referensi :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ul style="list-style-type: none"> • PP 8 Tahun 2006 • PERPRES Nomor 29 tahun 2014 • PERMENPAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 • PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana • Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar Disposisi • Rencana Kerja dan Anggaran • Komputer • Printer • Internet / Wifi • ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Data yang dilaporkan sesuai dengan laporan bulanan fisik dan keuangan	Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No.	Aktivitas	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KET
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag Renkeu	Sub Koordinator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris untuk memonitor Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Sosial						Agenda Kerja Rutin	15 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Kasubbag Perencanaan & Keuangan untuk membuat nota dinas ke Bidang di lingkungan Dinas Sosial perihal permintaan data capaian kinerja dan Keuangan						Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Membuat konsep Nota Dinas permintaan data dan memerintahkan Kasubbag Perencanaan & Keuangan untuk mengetik serta melengkapi dokumen pendukungnya						Disposisi	30 menit	Konsep Nota Dinas, Disposisi	
4	Mengetik konsep nota dinas permintaan data serta menyiapkan form pengisian data untuk Bidang di lingkungan Dinas Sosial						Konsep Nota Dinas, Disposisi	45 menit	Disposisi, Nota Dinas dan Form Pengisian Data	
5	Memeriksa dan menyerahkan konsep kelengkapan nota dinas kepada Sekretaris untuk diperiksa						Nota Dinas dan Form Pengisian Data	20 menit	Disposisi, Nota Dinas yg telah di buat dan Form Pengisian Data	
6	Memeriksa dan menandatangani nota dinas permintaan data dan kelengkapannya dan memerintahkan Kasubbag Perencanaan & Keuangan untuk mendistribusikan nota dinas permintaan data dan kelengkapannya						Nota Dinas yg telah di buat dan Form Pengisian Data yg diparaf Kasubbag Perencanaan & Keuangan	15 menit	Disposisi, Nota Dinas yang telah ditandatangani	
7	Memerintahkan Kasubbag Perencanaan & Keuangan untuk menyampaikan nota dinas serta menginventarisasi data capaian kinerja dan keuangan						Nota Dinas yang telah ditandatangani sekretaris	15 menit	Disposisi, Nota Dinas yang telah ditandatangani sekretaris	
8	Menyampaikan nota dinas permintaan data kinerja dan keuangan serta kelengkapannya ke Bidang di lingkungan Dinas Sosial					 	Nota Dinas yang telah ditandatangani sekretaris	60 menit	Nota Dinas permintaan data kinerja dan kelengkapannya	

No.	Aktivitas	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KET
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag Renkeu	Sub Koordinator	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Bidang menyusun data capaian dan keuangan pada program dan kegiatan masing-masing						Nota Dinas yang telah ditandatangani sekretaris	120 menit	Data Capaian Kinerja dan Keuangan Bidang	
10	Bidang menyerahkan data capaian dan keuangan terhadap program dan kegiatan masing-masing yang telah ditandatangani Kepala Bidang kepada Kasubbag Perencanaan & Keuangan						Data Capaian Kinerja dan Keuangan Bidang yang telah ditandatangani Kepala Bidang	15 menit	Data Capaian Kinerja dan Keuangan Bidang yang telah ditandatangani	
11	Menginventarisasi data capaian kinerja dan Keuangan sesuai waktu yang telah ditentukan						Nota Dinas Permintaan data dan kelengkapannya	180 menit	Data Capaian kinerja dan Keuangan Dinas Sosial	
								530 menit		

Dokumen Terkait

- Renstra Dinas Sosial
- DPA Dinas Sosial
- Perjanjian Kinerja Dinas Sosial
- Laporan Realisasi Anggaran
- Data kegiatan pada Bidang Bidang Dinas Sosial



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Alamat Kantor : Jl. Ketumbar Kel. Komet (0511) 4781749 Banjarbaru 70711
Email : dinsos@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU NOMOR : 079 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang:
- a bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun SAKIP di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
 - b. Bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru tentang Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** Keputusan ini untuk :
- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP 2023 Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
 - b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
 - c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Monitoring dan evaluasi kinerja
- KETIGA** : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal, 23 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU,

ROKHYAT RIYADI, SE. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700503 199803 1 009

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Nomor : 079 Tahun 2023
Tanggal : 23 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	ROKHYAT RIYADI, SE.M.Si NIP. 19700503 199803 1 009	Penanggung Jawab
2.	FAIZAL REZA KASRANSYAH, SE.MM NIP. 19740808 199803 1 006	Ketua
3.	MAS BAGUS RATNA INDRA, D.SR,SE NIP. 19681213 199503 2 003	Sekretaris
4.	SARI ERLIYANI, S.ST.M.AP NIP. 19710908 19403 1 004	Koordinator Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
5.	Hj.NOORAIDA FITRIA,S.ST.M.Si NIP. 19790824 200903 2 005	Anggota
6.	AKHMAD HIDAYAT. S.Sos NIP. 19660211 199603 1 006	Anggota
7.	LILIS MARYATI,SH, LLM NIP. 19750328 200604 2 017	Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial
8.	Hj. HELDA ARIANI, SE NIP. 19780406 200707 2 014	Anggota
9.	NOOR ASIAH, SKM NIP. 19740826 200003 2 003	Anggota
10.	NOOR IFANSYAH.S.ST.M.AP NIP. 19710130 199203 1 004	Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial
11.	SITI AGUSTINA AMALIA ,AMG NIP. 19770817 200012 2 002	Anggota
12.	SUDIAN NOOR, S.Sos NIP. 19710721 200604 1 013	Anggota
13.	HENDRA FAIZAL S.Sos NIP. 19760114 200901 1 001	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU,

ROKHYAT RIYADI, SE.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19700503 199803 1 009



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Alamat Kantor : Jl. Ketumbar Kel. Komet (0511) 4781749 Banjarbaru 70711
Email : dinsos@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU NOMOR : 061 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOTA BANJARBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokoh dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru

19. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/268/KUM/2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2021-2026 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal, 31 Januari 2023



**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU,**

ROKHYAT RIYADI, SE.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700503 199803 1 009

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru
Cq. Kepala Bagian Organisasi Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
4. Inspektur Kota Banjarbaru

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
NOMOR : 061 / TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2023

1. Nama Organisasi : DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan pembantuan yang diberikan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
 - c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan pelayanan sosial;
 - d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial;
 - f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat dan LK3	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan	<p><u>Makna Indikator :</u> Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah menjaga, menciptakan mendukung dan memperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Untuk menggali potensi masyarakat yang dapat didayagunakan untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Banjarbaru.</p> <p><u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang meningkat kemampuannya dibagi Jumlah Jumlah target Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 di kali 100%</p>	Bidang pemberdayaan Sosial
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<p><u>Makna Indikator :</u> PMKS adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar</p> <p><u>Alasan pemilihan indikator :</u> Bertujuan Untuk membantu melayani, membina agar PMKS dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat</p> <p><u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah PPKS yang terlayani dibagi dengan Jumlah target PPKS yang dilayani dikali 100%</p>	Bidang Rehabilitasi Sosial

3	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin	Persentase anak terlantar yang dipelihara	<p><u>Makna Indikator :</u> Seorang anak berusia 6-18 tahun meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang atau keluarga</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Anak terlantar mendapatkan jaminan dan perlindungan dan pemeliharaan dan pembinaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi</p> <p><u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan dibagi jumlah target anak terlantar di kali 100%</p>	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	<p><u>Makna Indikator :</u> Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan / atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya</p> <p><u>Alasan pemilihan indikator :</u> Bertujuan untuk membantu melayani, membina dan memberikan bantuan agar dapat melaksanakan peran sosialnya dimasyarakat.</p> <p><u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan dibagi Jumlah target Fakir Miskin di kali 100%</p>	

4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah / kota.	<p><u>Makna Indikator :</u> Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Bantuan kepada korban bencana alam dan sosial yang diberikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasarnya</p> <p><u>Cara Perhitungan :</u> Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan dibagi jumlah korban bencana di kali 100%</p>	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
---	--	--	---	---

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU,**



ROKHYAT RIYADI, SE.M.Si

Pembinat Utama Muda

NIP. 19700503 199803 1 009